

PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA LEBOTO

Jurisman Kadji

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Desa Leboto serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Di Desa Leboto. Penelitian ini dilakukan di Desa Leboto Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto sudah baik pelaksanaannya dalam hal ini aparat desa sudah tidak begitu terlibat secara keseluruhan, karena masyarakat hanya di berikan kartu tanda anggota penerima BLSM sudah bisa menerima langsung di kantor Pos. Factor penghambat dalam Implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Leboto adalah sebagai berikut : Kurang validnya data, BLSM tidak tepat sasaran, Jarak Tempuh dan Waktu penyaluran.

Kata Kunci: *Pembangunan Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Proses pembangunan disemua lapisan masyarakat paling tidak harus memiliki tujuan inti yakni: pertama, Peningkatan ketersediaan perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Kedua, Peningkatan standar hidup. Ketiga, Perluasan-perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Kemajuan komponen

merupakan komponen penting dalam pembangunan.

Masalah kemiskinan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi politik suatu negara. Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dari sensus data tahun 2000 sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan mencapai 125 juta jiwa atau 60,2 %. Sementara tingkat kemiskinan di perdesaan cukup tinggi di tinjau dari indikator jumlah presentase penduduk miskin (*head count*), maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin di indonesia adalah 37,3 juta jiwa atau sekitar 17,4% (Susenas 2003) dimana presentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 20,2 persen

sedangkan diperkotaan sebesar 13,6 persen.

Pada awal maret 2005 ini Pemerintah menetapkan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan mengalokasikan dana pengurangan subsidi tersebut untuk program-program yang sangat dibutuhkan dan langsung dirasakan oleh masyarakat miskin, khususnya yang berada di kawasan kumuh, daerah tertinggal dan pedesaan.

Kabupaten Gorontalo Utara melalui visi dan misinya yakni mewujudkan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai kekuatan Perekonomian yang menyiratkan cita-cita pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, tangguh, berdaya saing. Melalui pengembangan sektor ekonomi riil, yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pemerintah akan mampu menyelesaikan permasalahan pokok pembangunan yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Melalui Program Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diambil langkah oleh pemerintah pusat dalam mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia dapat membantu pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mewujudkan apa yang sudah menjadi target dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Tampubolon (2005:7) menyimpulkan bahwa pembangunan masyarakat (*Community Development*) sebagai berikut :

- a. Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap kegiatan tidak lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*).
- b. Pembangunan masyarakat bertujuan memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
- c. Pembangunan masyarakat memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themself* dapat menjadi kenyataan.

Pembangunan masyarakat memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama (*group action*) didalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di lakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (*garis kemiskinan*) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan

ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Sementara, kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relative tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah. Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk.

World Bank (2004) mendefinisikan masyarakat miskin sebagai mereka yang hidup dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya dibawah garis tertentu, seperti dibawah \$1 atau \$2 per hari atau dibawah level yang ditetapkan negara masing-masing.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut World Bank setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

- a. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
- b. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.
- c. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

Bank Dunia (World Bank) memiliki indikator-indikator kemiskinan yang terdiri dari:

- a. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas

- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- c. Pembangunan yang bias di kota
- d. Perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat
- e. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi
- f. Rendahnya produktivitas
- g. Budaya hidup yang jelek
- h. Tata pemerintahan yang buruk
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan

Konsep Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan public sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Selanjutnya Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

- a) Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah

karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

- b) Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d) Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) menolong daya beli masyarakat, karena terjadi pergerakan ekonomi serta menjaga agar masyarakat hampir miskin tidak semakin miskin “(*Menko Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa*). Kendala – kendala yang timbul dalam pelaksanaan program BLSM, antara lain :

1. BLSM dianggap bukanlah solusi tepat dalam menyelesaikan dampak yang terjadi akibat dari kenaikan BBM. BLSM ini hanya menjadi solusi sesaat bagi masyarakat
2. Belum adanya petunjuk teknis dan mekanisme yang tepat dalam proses penyaluran kepada masyarakat, hal ini akan mengakibatkan kebingungan pelaksana teknis dilapangan
3. Kategori miskin yang dipakai sebagai acuan masyarakat mendapat dana BLSM, masih menggunakan data yang belum di perbaharui sepenuhnya sehingga tidak jarang mengalami keracunan
4. Terdapat isu- isu politik yang mengiringi turunnya kebijakan BLSM.

Munculnya fenomena yang mungkin terlewat oleh para ahli sekalipun, yaitu perubahan tata nilai, etika, budaya kemandirian dan patriotisme di tengah masyarakat yang menjadikan kemiskinannya sebagai suatu produk yang layak dijual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Data yang diperoleh dari informan biasanya disatukan, dan awal analisis data digunakan untuk mempertajam pengumpulan data selanjutnya. (Moleong, 2005: 29).

Sedangkan teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Adapun Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Kegiatan utama dalam analisis data, seperti: menyajikan data, Penarikan Simpulan/ Verifikasi, sampai pada penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Leboto

Desa Leboto merupakan bagian wilayah Kecamatan Kwandang yang tepatnya di pertengahan pusat Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di provinsi Gorontalo, berbatasan langsung dengan laut Sulawesi di bagian utara. Luas Gorontalo Utara adalah 1.676.150 Km² atau 10,07 % dari luas wilayah provinsi Gorontalo dengan posisi geografis pada 00.30'-10.02' LU dan 1210 59'-1230 02 BT. Suhu udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai.

Suhu udara rata-rata di Gorontalo Utara tahun 2011 berkisar antara 23.3⁰C – 33⁰C. Tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi, kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 72,2% - 84,1%. Curah hujan tertinggi tercatat 164 MM dan hari hujan sebanyak 142 hari.

Desa Leboto merupakan bagian wilayah Kecamatan Kwandang yang tepatnya di pertengahan pusat Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang masyarakatnya sebahagian besar tinggal dan bermukim didaratan dan sebagian kecil berada dilereng-lereng gunung dengan luas wilayah Desa Leboto kurang lebih 2.440 Ha yang dihuni oleh 620 Kepala Keluarga atau 2.186 jiwa yang tersebar pada 4 Dusun dalam wilayah kesatuan Desa Leboto.

2. Implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto

Implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto sudah baik pelaksanaannya dalam hal ini aparat desa sudah tidak begitu terlibat secara keseluruhan, karena masyarakat hanya di berikan kartu tanda anggota penerima BLSM sudah bisa menerima langsung di kantor Pos. Kedengarannya memang sangat ideal, akan tetapi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang digulirkan sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM tersebut dinilai sebagian pihak sebagai kebijakan yang sensitif, hal ini di sebabkan karena dari jumlah yang di terima masyarakat sedikit sedangkan akibat dari kenaikan BBM semua bahan pokok kebutuhan sehari-hari ikut naik juga. Sehingga antara yang di terima masyarakat dengan yang harus di keluarkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak menjadi seimbang. Walaupun tidak seimbang tetapi tidak bias di pungkiri bahwa adanya program bantuan langsung sementara masyarakat ini sangat membantu bagi rumah tangga miskin karena sesuai hasil wawancara program ini sudah sangatlah membantu hanya tinggal di seimbangkan antara yang di terima dan yang di keluarkan masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

3. Faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto

Faktor penghambat dalam Implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Leboto adalah sebagai berikut :

1. Kurang validnya data

Data yang kurang valid bias berakibat fatal dalam pendistribusian dana BLSM kepada masyarakat. Yang terjadi di lapangan berupa penerima BLSM sesuai data yang di terima oleh aparat Desa ternyata ada beberapa orang yang sudah meninggal, sehingga ini sangat menimbulkan kerancuan dan harus melakukan pendataan kembali. Hal ini di sebabkan karena aparat Desa maupun Kecamatan tidak di libatkan langsung dalam pengambilan data. Penyaluran BLSM pada tahun 2013 ini pemerintah pusat dalam hal ini adalah BPS memberikan data lama padahal seharusnya yang di lakukan dalam mengantisipasi masalah ini dengan melakukan pendataan kembali melalui aparat Desa sehingga data yang tadinya kurang bisa tertutupi dengan data baru dari hasil yang di survey langsung oleh aparat Desa.

2. BLSM tidak tepat sasaran

Bantuan langsung sementara masyarakat yang tidak sasaran ini di sebabkan karena data yang tidak valid. Sehingga yang seharusnya wajib menerima karena tidak masuk dalam data yang dari BPS jadi tidak menerima. Hal ini banyak di khawatirkan oleh aparat Desa maupun kecamatan banyak yang miskin tidak masuk daftar penerima BLSM sedangkan orang yang tidak wajib menerima terdaftar sebagai penerima, memang jauh sebelumnya sudah di perkirakan bahwa BLSM terlihat tidak akan tersalurkan dengan baik karena banyak yang akan salah sasaran akibat dari tidak di libatkannya aparat Desa dalam melakukan pendataan. Kesalahan

pendataann seperti ini sangatlah rawan akan masalah konflik antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan aparat Desa.

3. Jarak Tempuh

Jarak tempuh yang di maksudkan di sini yakni jarak antara tempat tinggal penerima BLSM dan kantor pos, ini juga merupakan hambatan yang harus di hadapi oleh masyarakat sehingga harus membayar lagi kendaraan untuk bias sampai ke kantor pos ada pula yang rela berjalan kaki, apalagi ketika sampai di tempat penerimaan harus menunggu antrian panjang, hal ini sangatlah rawan terhadap konflik antara masyarakat dan petugas. Belum lagi jika menunggu sampai seharian, masyarakat banyak yang tidak akan beraktivitas dalam artian bekerja misalnya seperti petani yang seharusnya berkebun tertunda karena harus berjalan kaki untuk menerima BLSM di kantor pos dan harus menunggu antrian, banyak waktu yang tersita karena di sebabkan oleh akses yang cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat.

4. Waktu penyaluran

Waktu penyaluran biasanya sering terlambat dari waktu yang sudah di tetapkan sebelumnya. Ini biasanya mengakibatkan banyak yang tidak dapat menerima karena tanggal yang sudah di tetapkan tidak ada penyaluran maka menimbulkan kekecewaan masyarakat dan mengurangi rasa percaya. Dari kurangnya rasa percaya ini jika sudah ada BLSM maka masyarakat akan ragu untuk datang menjemput dan akhirnya waktu terlewatkan masyarakat tidak dapat menerima karena uang yang tidak tersalurkan akan di kembalikan ke pusat.

PENUTUP

Implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto sudah baik pelaksanaannya dalam hal ini aparat desa sudah tidak begitu terlibat secara keseluruhan. Program BLSM sangat membantu masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan sekalipun jumlah yang di terima memang masih kurang tetapi sudah lebih dari cukup. Sementara faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto yaitu data yang kurang valid dan Jarak tempuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dillon,hs 2001. *Peradigma Ekonomi Yang Pro Kaum Miskin Dan Pro Keadilan : Belajar dari kesalahan masa lalu*, jurnal ekonomi rakyat
- Edward III*, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
Effendi, Sofyan.
- Islamy*, M.Irfan (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. ... desember 2011. KRJogja
- Kuncoro. Mudrajad. 1997. *Ekonomi pembangunan :teori, masalah, dan kebijakan*. Uup amp ykpn. Yogyakarta.
- Moleong, lexy J., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Winarno, Budi*. 2007, *Kebijakan Publik, teori dan Proses*,Jakarta
- Todaro, Michael P .2004. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Terjemahan oleh Hair Mundar. Erlangga . Jakarta
- Undang – undang nomor 11 tahun 2009
(RPJM Nasional 2004-2009, 2005 :252).
World Bank (2001-2004-2005)